

## BANTUAN HUKUM

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.8, BD 2025/NO.8, 4 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### ABSTRAK:

- Pemerintah Daerah menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas; bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi; bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- Dasar Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024; PERDA Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2019; PERWAL Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta ini mengatur ketentuan perubahan kedua atas peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 21 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Peraturan ini mencakup ketentuan Pasal 8 dan ketentuan ayat (2) Pasal 31 yang diubah, serta lampiran III yang dihapus.

### CATATAN:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025.
- Jumlah Halaman: 4 hlm.